

ANALISIS KEGAGALAN PERSERIKATAN BANGSABANGSA (PBB) DALAM MENEGAKKAN NORMA RESPONSIBILITY TO PROTECT (R2P) DI UKRAINA

Zikry Aulia Husra

UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstrak: Artikel ini membahas upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menegakkan norma Responsibility to Protect (R2P) di Ukraina. Dimana penegakkan norma R2P di Ukraina masih gagal. Salah satu alasan dari kegagalan ini adalah karena penyeimbangan kekuatan besar yang terjadi dalam dinamika hubungan Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB antara Amerika Serikat dan Rusia. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pertanyaan penelitian eksplanatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam artikel ini adalah dengan menggunakan studi dokumentasi. Adapun teknik analisis yang digunakan merupakan teknik analisa Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam melakukan analisis dan olah data, peneliti menggunakan teori Balnce of Power (BOP) dengan frame neorealisme. Peneliti melihat alasan kegagalan PBB dalam menegakkan norma R2P disebabkan oleh konflik kubu yang saling berusaha mengimbangi kubu lainnya.

Kata Kunci: : Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Responsibility to Protect (R2P), Dewan Keamanan PBB (DKPBB), Balance of Power, konflik Rusia dan Ukraina

Abstract: This article discusses the efforts of the United Nations (UN) in enforcing the Responsibility to Protect (R2P) norm in Ukraine. Where the enforcement of R2P norms in Ukraine has failed. One of the reasons for this failure is due to the great power balancing that occurs in the dynamics of UN Security Council Permanent Member relations between the United States and Russia. This article uses qualitative research methods with explanatory research questions. The data collection method used in this article is by using documentation studies. The analysis technique used is the Miles and Huberman analysis technique which consists of data reduction, data presentation and conclusion drawing. In analyzing and processing data, researchers used the Balnce of Power (BOP) theory with a neorealism frame. Researchers see the reason for the UN's failure to uphold the R2P norms is due to the conflict of camps that try to balance each other.

Keywords: : United Nations (UN), Responsibility to Protect (R2P), UN Security Council (UNSC), Balance of Power, Russia and Ukraine conflicts

Article History: *Received 25 March 2024, Revised: 30 April 2024, Accepted: 07 May 2024, Available online 01 July 2024*

PENDAHULUAN

Perang antara Rusia dan Ukraina telah menyebabkan berbagai permasalahan terhadap kemanusiaan, khususnya bagi masyarakat sipil di Ukraina. Puluhan ribu orang terluka dan sebagian darinya kehilangan nyawa. Perang yang dimulai dengan invasi Rusia pada akhir Februari 2022 silam, akibat perbedaan kepentingan antara Ukraina yang ingin bergabung dengan North Atlantic Treaty Organization (NATO) dan Rusia yang tidak menginginkan musuh bermarkas di dekat perbatasannya, hal ini telah menciptakan ketegangan politik dan keamanan di skala global. Konflik ini juga menyebabkan krisis kemanusiaan yang cukup parah dengan jutaan orang kehilangan tempat tinggal, ribuan orang tewas atau terluka, dan kota-kota besar mengalami kerusakan yang masif, termasuk infrastruktur krusial seperti rumah sakit, sekolah, dan jaringan listrik. Konflik ini, telah berdampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat sipil, dan melanggar Konvensi Jenewa. Adapun salah satu cara yang cocok untuk mengatasi kejahatan terhadap masyarakat sipil, adalah dengan menegakkan norma Responsibility to Protect (R2P). R2P merupakan sebuah gagasan yang telah diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2005 di Majelis Umum PBB.¹ Sebagai sebuah norma yang diadopsi oleh PBB pada World Summit 2005, dan berlaku bagi seluruh negara anggota PBB.

sebagai mana yang tertulis pada consensus resolution A/RES/63/308.² Norma ini hadir sebagai tanggapan masyarakat internasional terhadap berbagai kejahatan kemanusiaan yang terjadi pada tahun 1990-an, seperti genosida di Rwanda pada tahun 1994 dan perang Kosovo pada tahun 1999. R2P juga dapat disebut sebagai sebuah adaptasi dari konsep barat yang ada sebelumnya, Hak Intervensi. Perubahan konsep ini terjadi akibat objektif yang dianut oleh Hak Intervensi berseberangan

¹ Nicholas Glover. "A critique of the theory and practice of R2P." E-International Relations (2011): 1

² Global Centre for the Responsibility to Protect "What is R2P?" globalr2p (n.d) diakses pada 29 Juni 2024 <https://www.globalr2p.org/what-isr2p/#:~:text=The%20Responsibility%20to%20Protect%20populations%20from%20genocide%2C%20war%20crimes%2C%20crimes,Background%20Briefing%20on%20R2P>

dengan pandangan Majelis Umum PBB. R2P memiliki arah yang lebih jelas dan kuat dalam kaitannya terhadap gagasan paham kemanusiaan, fokus R2P adalah ‘memusatkan perhatian ke tempat yang seharusnya, yakni kemaslahatan manusia untuk mencari bantuan dan perlindungan’. R2P berfokus terhadap 4 poin utama yakni pencegahan terhadap genosida, pembersihan etnis, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.³ Dan gagasan utama dalam norma ini adalah komunitas internasional harus bertindak untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap poin-poin diatas.

Namun dalam melaksanakan norma ini, komunitas internasional memerlukan sebuah jalur yang jelas dan memiliki legitimasi yang tepat. Maka dari itu dalam penegakkannya dibutuhkan pihak ketiga yang mampu mengorganisir penegakkan norma ini. PBB sebagai organisasi internasional terbesar memiliki tanggung jawab sebagai ‘pengawas’ yang bertugas untuk menjaga perdamaian, dengan bantuan Dewan Keamanan PBB (DKPBB), terkhususnya para anggota tetap DKPBB, yakni Amerika Serikat, Britania Raya, Perancis, Russia dan China. sesuai dengan UN Charter VIII mengenai regional arrangement pasal 52 yang menyatakan bahwa

*“.... matters relating to the maintenance of international peace and security are consistent with the Purposes and Principles of the United Nations make every effort to achieve pacific settlement of local disputes through such regional arrangements or by The Security Council shall encourage the development of pacific settlement of local disputes through such regional arrangements or by such regional agencies”.*⁴

Dalam penerapan R2P, keberhasilannya dapat dinilai dari dua indikator sebagaimana yang tertulis dalam dokumen A/RES/60/1 dalam ayat ke 139, yakni collective action dan timely and decisive manner. Dalam salah satu kasus yang berhasil, Konflik Kenya, DKPBB mengeluarkan

³ Flammata Borgia. “The Responsibility to Protect Doctrine: Between Criticisms and Inconsistencies” *Journal on the Use of Force and Internastional Law* Vol. 2 No 2 (2015): 225

⁴ United Nations. “United Nations Charter, Chapter VIII: Regional Arrangements” un.org diakses pada 23 Juni 2024 <https://www.un.org/en/about-us/un-charter/chapter-8>

resolusi S/RES/1804 (2008). Resolusi tersebut menyerukan diakhirinya kekerasan dengan segera dan mendesak semua pihak untuk berupaya mencapai resolusi damai, yang dibantu dan dituntun oleh negara anggota PBB lainnya, yang bertindak sebagai mediator. Kemudian dalam poin kedua mengenai ketepatan waktu, DKPBB menanggapi konflik ini dengan sangat cepat, 2 bulan. Akibatnya, konflik ini tidak memakan banyak korban.

Namun hal ini berbeda dengan apa yang terjadi di konflik antara Rusia dan Ukraina. Berdasarkan kedua indikator di atas PBB belum memenuhi satupun. Dalam persoalan *collective action*, DKPBB telah gagal mengimplementasi resolusi S/2022/720 yang berisi tentang *Maintenance of Peace and Security of Ukraine*. Resolusi ini gagal akibat veto yang diberikan oleh Rusia.⁵ Akibatnya hal ini berpengaruh terhadap indikator kedua dari penegakkan norma R2P, *Timely and Decisive Manner*, pada akhirnya korban jiwa di Ukraina bertambah dengan rincian; jumlah korban luka-luka dan jiwa dari kalangan sipil yang mencapai 30.457 korban. Dan diantara korban ini korban anak-anak mencapai 1.875 korban.⁶ Kejahatan yang dilakukan oleh Rusia telah melanggar poin keempat dari poin-poin R2P, *crime against humanity* yang dapat didefinisikan sebagai tindakan-tindakan berikut ini yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil, dan mengetahui adanya serangan tersebut; pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi paksa, penyiksaan, dll.⁷

Apabila negara tidak mampu memikul tanggung jawabnya dalam melindungi masyarakat sipilnya secara penuh, maka tanggung jawab tersebut jatuh ke Komunitas Internasional, termasuk didalamnya PBB

⁵ UNSC “9143rd Meeting: Maintenance of Peace and Security of Ukraine” S/PV.1943 (30 September 2022): 9

⁶ Statista. “Number of civilian casualties in Ukraine during Russia's invasion verified by OHCHR from February 24, 2022 to February 15, 2024” statista.com diakses pada 23 Juni 2024 <https://www.statista.com/statistics/1293492/ukraine-war-casualties/>

⁷ Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect “Crime Against Humanity” United Nations (n.d) diakses pada 29 Juni 2024 <https://www.un.org/en/genocideprevention/crimes-against-humanity.shtml>

sebagai institusi internasional terbesar. Namun yang terjadi bertolak belakang dari kewajiban PBB yang seharusnya mengutamakan perdamaian internasional. Dalam kasus Rusia dan Ukraina, Rusia sebagai salah satu pemegang hak Veto telah menyalahi asas-asas berdirinya PBB. Berbagai manuver politik terjadi di dalam internal DKPBB, dimana setiap negara berlomba-lomba untuk saling memenuhi kepentingan nasionalnya masing-masing. Hal ini menjadi salah satu alasan terbesar di balik gagalnya penerapan norma R2P di Ukraina.

METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif, karena dapat membantu dalam proses penjelasan analisis upaya dalam mencapai suatu tujuan dari topik yang diangkat secara menyeluruh. Penelitian deskriptif bertujuan memaparkan secara tepat sifat yang dimiliki setiap individu, keadaan, atau frekuensi hubungan spesifik antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam suatu fenomena. Perbedaan yang dapat dilihat apabila memakai tipe penelitian eksplanatif adalah pemaparan data yang harus mendapatkan kesimpulan atau hasil akhir dari suatu fenomena, maka dari itu tipe penelitian deskriptif lebih cocok digunakan dalam memaparkan informasi dari sudut pandang peneliti secara berurutan.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan data sekunder yang telah tersedia di kalangan umum. Data sekunder dapat lebih membantu mempermudah analisa penelitian secara efektif dan menyeluruh. Data sekunder dapat diperoleh dari tangan kedua pemilik sumber data dan dapat berasal dari dokumen, jurnal, buku, dan laporan-laporan yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah teknik yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dari 3 bagian-kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Peneliti menggunakan teknik ini karena data-data yang peneliti dapat kumpulkan berasal dari berbagai sumber, seperti NATO, PBB, Lembaga R2P, press conference Rusia dan Ukraina. Dengan pengaplikasian tahapan ini, maka tingkat bias dari data yang dikumpulkan dapat terminimalisirkan. Selain itu, teknik ini juga dapat meminimalisir subjektivitas data dan memaksimalkan tingkat keabsahan data yang telah disimpulkan untuk kemudian diteliti

lebih lanjut. Proses ini akan mempermudah peneliti agar tidak melakukan analisis data berulang saat penelitian berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang dipaparkan dibawah ini berasal dari laman resmi PBB, mengenai upaya PBB dalam menerapkan norma Responsibility to Protect di Ukraina melalui Collective Action berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB. PBB diketahui telah melakukan berbagai aksi untuk mencegah pecahnya konflik di Ukraina dan Rusia pra-Februari 2022, walaupun berakhir gagal namun PBB terus-menerus berusaha untuk mende-eskalasi konflik yang ada melalui Dewan Keamanan PBB. Sejak awal Invasi diluncurkan oleh Rusia, DKPBB telah berusaha meloloskan dua Resolusi yakni rancangan resolusi S/2022/155 dan S/2022/720, pada sub-bab ini peneliti akan mendeskripsikan kedua resolusi ini.

1. Rancangan Resolusi S/2022/155

Rancangan Resolusi S/2022/155 merupakan rancangan yang diajukan oleh 81 negara.⁸ Resolusi ini berjudul “Letter dated 28 February 2014 from the Permanent Representative of Ukraine to the United Nations addressed to the President of the Security Council (S/2014/136)”. Surat yang dikirimkan oleh Ukraina kepada presiden DKPBB pada 28 Februari 2014 berisi keinginan Ukraina untuk dapat hadir dalam sidang DKPBB dengan keinginan

⁸ Albania, Andorra, Antigua and Barbuda, Australia, Austria, Bahamas, Barbados, Belgium, Belize, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Bulgaria, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, Estonia, Fiji, Finland, France, Gambia, Georgia, Germany, Greece, Grenada, Guatemala, Haiti, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Jamaica, Japan, Kiribati, Kuwait, Latvia, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Monaco, Montenegro, Netherlands, New Zealand, Niger, North Macedonia, Norway, Palau, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Samoa, San Marino, Singapore, Slovakia, Slovenia, Spain, Suriname, Sweden, Switzerland, Timor-Leste, Trinidad and Tobago, Turkey, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and United States of America:

untuk membela integritas wilayahnya, sebagaimana yang tertulis dalam suratnya:

“Due to the deterioration of the situation in the Autonomous Republic of the Crimea, Ukraine, which threatens the territorial integrity of Ukraine, and upon the relevant instruction of my Government, I have the honour to request an urgent meeting of the Security Council in accordance with Articles 34 and 35 of the Charter of the United Nations.

I also have the honour to request that, in accordance with the relevant provisions of the Charter and rule 37 of the provisional rules of procedure of the Security Council, a representative of the Government of Ukraine be allowed to participate in the meeting and to make a statement”.

Rancangan resolusi ini tidak hanya mempersoalkan keinginan Ukraina untuk bergabung dalam DKPBB, namun memiliki tujuan implisit yang ingin menekan pengaruh Rusia di komunitas internasional terkhususnya anggota DKPBB. Hal ini disampaikan langsung oleh Utusan Albania untuk DKPBB, Hoxha dalam pertemuan ke 8979 DKPBB pada tanggal 25 Februari 2022.

Ia menyatakan bahwa “Rancangan resolusi S/2022/155, yang akan kita putuskan hari ini, merupakan pesan kepada masyarakat Ukraina bahwa dunia berada di pihak mereka dan mendukung rakyat Ukraina serta pesan kepada dunia bahwa peraturan yang kita buat bersama harus dipertahankan, mengingat jika kita tidak menegakkannya, maka siapa lagi yang akan melakukannya? resolusi ini juga merupakan pesan bagi Rusia, khususnya bagi warga Rusia pemberani yang memprotes perang yang tidak mereka inginkan. Rancangan resolusi ini menuntut diakhirinya perang tersebut”. Pernyataan ini mengimplikasikan maksud tersembunyi dari pengajuan rancangan resolusi S/2022/155 di DKPBB, sebagai alat untuk menekan Rusia atas invasi yang dilakukan.

2. Rancangan Resolusi S/2022/720

Rancangan resolusi S/2022/720 merupakan rancangan yang diajukan oleh Albania bersama Amerika Serikat kepada DKPBB.

Rancangan ini berjudul “Maintenance of Peace and Security of Ukraine”. Rancangan yang diajukan pada 30 September 2022 di pertemuan DKPBB ke-9143 memiliki 13 poin, yang sebagian besarnya berisi mengenai tindakan Rusia yang telah melanggar Piagam PBB dan mengabaikan integritas wilayah Ukraina, khususnya di daerah Luhansk dan Donetsk.

Sekaligus, meminta Rusia untuk menarik mundur pasukannya dari seluruh wilayah Ukraina, hal ini tertuang dalam poin ke 9 dari Rancangan Resolusi S/2022/720;

“Decides that the Russian Federation shall immediately cease its fullscale unlawful invasion of Ukraine and refrain from any further unlawful threat or use of force against any Member State;”.

Serta menarik mundur pasukannya dari daerah yang saat ini sudah dikuasai oleh Rusia, sebagaimana yang tercantum pada poin kesepuluh;

“Decides that the Russian Federation shall immediately, completely and unconditionally withdraw all of its military forces from the territory of Ukraine within its internationally recognized borders, which includes those regions addressed by the illegal so-called referenda, to enable a peaceful resolution of the conflict between the Russian Federation and Ukraine through political dialogue, negotiation, mediation or other peaceful means;”.

Namun, kedua rancangan resolusi ini tidak diadopsi oleh PBB karena veto yang dijatuhkan oleh Rusia. Akibatnya, semua langkah preventif dan solutif yang diajukan menjadi tidak sah dan tidak dapat diterapkan lebih lanjut.

ANALISIS KEGAGALAN PBB DALAM PENEGAKKAN NORMA R2P DI UKRAINA BERDASARKAN INDIKATOR COLLECTIVE ACTION MELALUI DRAFT RESOLUSI DKPBB S/2022/155 DAN S/2022/720

Dalam upaya melakukan collective action yang merupakan salah satu bagian dari R2P, DKPBB gagal mengadopsi dua rancangan resolusi yang

bertujuan untuk menghentikan invasi Rusia terhadap Ukraina, rancangan resolusi S/2022/155 dan S/2022/720. Rancangan ini secara berurutan diajukan beberapa hari setelah Rusia menginvasi Ukraina dan pada akhir September di tahun yang sama, terpaut 7 bulan. Kedua rancangan ini gagal diadopsi oleh DKPBB akibat posisi Rusia yang menolak dan me-veto.

Selain karena penolakan Rusia, perbedaan kepentingan negara-negara anggota DKPBB juga memperburuk jalannya sidang pemutusan pengadopsian rancangan resolusi. Di bawah ini, peneliti akan menganalisis kegagalan PBB dalam menegakkan norma R2P di Ukraina yang disebabkan oleh konflik kepentingan negara anggota DKPBB. Konflik ini terlihat dalam kedua rancangan resolusi, S/2022/155 dan S/2022/720, dimana negara anggota DKPBB terbagi menjadi dua kubu, pihak yang menyetujui dan tidak menyetujui-termasuk di dalamnya yang abstain.

1. Rancangan Resolusi S/2022/155

Negara anggota DKPBB memiliki perbedaan yang besar dalam menyikapi agenda pengadopsian rancangan resolusi ini ke dalam tubuh DKPBB. Rancangan yang bertujuan untuk menanggapi surat Ukraina untuk presiden DKPBB pada 2014 silam, berisikan mengenai keinginan Ukraina untuk dapat ikutserta pada rapat DKPBB, untuk membahas integritas wilayahnya yang telah diancam oleh Rusia.

Adapun hasil pemungutan suara dalam rancangan ini ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1 Hasil Pemungutan Suara Rancangan Resolusi S/2022/155

SETUJU	MENOLAK	ABSTAIN
<ul style="list-style-type: none">AlbaniaBrazilPerancisGabonGhanaIrlandiaKenyaMexicoNorwegiaBritania Raya	<ul style="list-style-type: none">Rusia	<ul style="list-style-type: none">TiongkokIndiaUni Emirat Arab

• Amerika Serikat		
-------------------	--	--

Sumber: dokumen PBB S/PV.8979

Rancangan Resolusi ini pada akhirnya ditolak untuk diadopsi oleh DKPBB karena veto yang dimiliki oleh Rusia. Namun, terlepas dari kegagalan pengadopsian rancangan ini, peneliti perlu melihat konflik kepentingan yang dimiliki oleh kedua kubu.

a. Negara yang Menyetujui

Sebelas negara menyetujui pengadopsian rancangan resolusi ini berdasarkan kepentingan kolektif yang dimiliki. Utusan Amerika Serikat, Thomas Greenfield menyatakan bahwa Rusia memiliki pilihan untuk tidak menginvasi Ukraina, dan tidak ada hambatan apapun yang mencegah Rusia untuk menarik pasukannya dari wilayah Ukraina.⁹ Dan Dewan Keamanan PBB yang fungsi utamanya adalah untuk menjaga dan menciptakan perdamaian menjadi alasan Amerika Serikat untuk menekan agresif yang dilakukan oleh Rusia.

Greenfield kemudian menyatakan maksud dari penyerahan rancangan ini ke DKPBB sebagai bentuk kecaman Amerika Serikat dan sekutunya atas tindakan Rusia, dan meminta Rusia untuk mengembalikan semua hal yang berkenaan dengan konflik sebagaimana sebelumnya. Salah satu tindakan yang Greenfield lakukan dalam sidang tersebut adalah ancaman terhadap citra negara yang menolak dan abstain dalam pengambilan keputusan dengan menyertakan bahwa selain negara yang menyetujui rancangan resolusi ini merupakan negara yang mengabaikan tugasnya sebagai anggota DKPBB dan negara yang agresif dan tidak berintegritas.

Hal yang menarik dari pernyataan yang diberikan oleh Greenfield adalah ketika Ia menyebutkan “avert unnecessary war”. Amerika Serikat tidak benar-benar menjunjung tinggi tugas dan kewajiban DKPBB, mengingat hingga saat ini, Amerika Serikat

⁹ Dokumen PBB S/PV.8979 (2022): 2

masih aktif membantu Israel dalam peperangan. Kepentingan kolektif ini disampaikan oleh pihak lawan Amerika Serikat, yakni Tiongkok, bahwa Amerika Serikat dan sekutunya menyetujui rancangan ini demi membantu ekspansi NATO.¹⁰

Apabila hal ini terjadi maka kestabilan politik di wilayah Eropa Timur dapat menyebar hingga ke seluruh Eropa dan mengancam status quo. Pendapat ini disampaikan oleh Mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Rusia, Michael McFaul, pada 21 April 2022, 2 bulan pasca rancangan resolusi ini ditolak, Ia menyatakan bahwa;

*“The United States has a moral interest in helping them stop Putin's invasion. But I also think we have a security interest in doing so. Let's just put it very simply: if Putin wins in Donbas and is encouraged to go further into Ukraine, that will be threatening to our NATO allies, Conversely, if he loses in Donbas, or he fights to a stalemate, that will be a comforting to our allies, and therefore I think we have a major strategic interest to help the Ukrainians win the battle of Donbas”.*¹¹

Dalam pernyataan ini, McFaul secara jelas menyatakan dukungan Amerika Serikat terhadap Ukraina Amerika Serikat dan sekutunya. Sikap Amerika Serikat dan sekutunya terhadap rancangan resolusi ini sangat berbeda dengan apa yang telah disampaikan dalam persidangan. Berdasarkan pernyataan ini, Amerika Serikat dan sekutu, tidak menginginkan pengaruh Rusia tersebar di dataran Eropa.

Demi merealisasikan rancangan ini Amerika Serikat juga menyebutkan negara-negara kecil yang tidak termasuk dalam keanggotaan DKPBB, dengan tujuan untuk meningkatkan ‘kekuatan’nya dalam persidangan. Hal ini dilakukan oleh Utusan

¹⁰ Ibid. 12

¹¹ NBC. “Amb. Michael McFaul: U.S. has ‘a major strategic interest to help the Ukrainians win the battle of Donbas’” NBCUniversal (21 April 2022) diakses pada 4 Juni 2024 <https://www.yahoo.com/news/amb-michaelmcfaul-u-major-183111659.html>

Amerika Serikat pada pernyataan terakhirnya dalam sidang dengan menyebutkan 16 negara.¹²

b. Negara yang Menolak dan Abstain

Tiongkok sebagai negara yang memilih abstain dalam pemungutan suara ini bertindak sesuai dengan kepentingannya, sebagai negara non-intervensi. Zhang Jun, Utusan Tiongkok untuk DKPBB mengajukan saran untuk menghormati integritas wilayah setiap negara anggota PBB termasuk di dalamnya Rusia. Tiongkok abstain juga disebabkan oleh hubungannya dengan Rusia yang cukup dekat. Tiongkok merupakan salah satu negara yang masih menggunakan batu bara sebagai sumber daya energinya. Pada Maret 2022, Tiongkok berambisi untuk mengganti sumber dayanya dari batu bara ke minyak bumi dan gas.¹³ Dengan berlangsungnya perang antara Rusia dan Ukraina serta sanksi terhadap perdagangan Rusia oleh negara-negara barat yang berujung kepada penurunan ekspor energi Rusia, Tiongkok mampu merealisasikan kepentingan nasionalnya dan mengimpor energi Rusia dengan harga yang lebih murah.¹⁴

Hal serupa juga dinyatakan oleh Utusan Rusia untuk DKPBB, Nebenzia, yang menyatakan bahwa perang ini terjadi akibat hasutan Amerika Serikat dan sekutu yang berusaha mencari legitimasi untuk mengurangi pengaruh Rusia di Internasional, khususnya di wilayah Eropa.¹⁵ Nebenzia kemudian menyatakan sikap Amerika Serikat yang sebelumnya menjustifikasi rancangan

¹² Barbados, Kroasia, Estonia, Gambia, Grenada, Haiti, Jamaika, Jepang, Kiribati, Lesotho, Pulau Marshall, Monaco, Makedonia Utara, Palau, Papua Nugini dan Suriname.

¹³ Alicia Garcia “The Russia–Ukraine crisis is bad news for China's economy” eastasiaforum (18 April 2022) diakses pada 25 Juni 2024 <https://eastasiaforum.org/2022/04/18/the-russia-ukraine-crisis-is-bad-news-for-chinaseconomy/>

¹⁴ Maksym Skrypchenko “Is China growing tired of Russia’s war in Ukraine?” aljazeera (17 April 2024) diakses pada 25 Juni 2024 <https://www.aljazeera.com/opinions/2024/4/17/is-china-growing-tired-of-russias-war-inukraine>

¹⁵ Dokumen PBB S/PV.8979 (2022): 13

resolusi ini sebagai bagian dari usaha Amerika Serikat dan Sekutu untuk menegakkan Piagam PBB, sebagai sebuah standar ganda. Ia menyatakan;

“We see how the situation is being exploited in propagandistic exercises by Western politicians and media outlets. I would like to ask them where they they have been for the past eight years. Why were they not concerned when shelling and killing occurred in Donbas? Why did they not even bother to notice that there are more than 4 million people living in the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic who, at best, were branded as pro-Russian separatists? Why did they not call out Poroshenko when he said that the residents of Donbas would rot in basements? Why did they not call out Zelenskyy when he called those same residents “non-people” and “specimens”?”¹⁶

Pernyataan ini mengutuk sikap Amerika Serikat yang selama delapan tahun prainvasi Februari 2022, tidak mengutuk tindakan nasionalis Ukraina yang melanggar Hukum Humaniter Internasional.

2. Rancangan Resolusi S/2022/720

Rancangan ini merupakan rancangan resolusi kedua yang bertujuan untuk mewujudkan perdamaian di Ukraina. Rancangan ini diajukan oleh Albania dan Amerika Serikat. Rancangan yang diajukan pada 30 September 2022 ini berjudul maintenance of peace and security of Ukraine. Sebagaimana yang dimaksudkan dalam rancangan resolusi S/2022/155, rancangan ini juga memiliki tujuan yang sama. Hasil pemungutan suara terhadap rancangan ini ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2 Hasil Pemungutan Suara Rancangan Resolusi S/2022/720

¹⁶ Ibid

SETUJU	MENOLAK	ABSTAIN
<ul style="list-style-type: none">• Albania• Perancis• Ghana• Irlandia• Kenya• Mexico• Norwegia• Britania Raya• Uni Emirat Arab• Amerika Serikat	<ul style="list-style-type: none">• Rusia	<ul style="list-style-type: none">• Tiongkok• India• Gabon• Brazil

Sumber: dokumen DKPBB S/PV.9143

Rancangan Resolusi ini pada akhirnya ditolak untuk diadopsi oleh DKPBB karena veto yang dimiliki oleh Rusia. Namun, terlepas dari kegagalan pengadopsian rancangan ini, peneliti perlu melihat konflik kepentingan yang dimiliki oleh kedua kubu.

a. Negara yang Menyetujui

Sepuluh negara menyetujui rancangan resolusi yang diajukan oleh Albania. Amerika Serikat sebagai negara adidaya yang mendukung rancangan resolusi ini menyatakan bahwa pentingnya keterlibatan seluruh anggota DKPBB dalam menghadapi Rusia, terlepas dari statusnya sebagai anggota tetap DKPBB. Tidak cukup berbeda dari rancangan resolusi sebelumnya, S/2022/155, Amerika Serikat menyatakan urgensi pengesahan dan pengadopsian rancangan resolusi ini merupakan kepentingan kolektif seluruh negara anggota PBB agar terhindar dari invasi dan aneksasi.

Hal yang senada juga dikatakan oleh Utusan Albania untuk DKPBB, Dautllari, yang membatasi dan mengklasifikasi DKPBB ke dalam dua bagian, mereka yang menolak rancangan resolusi adalah mereka yang menolak Piagam PBB dan integritas wilayah.¹⁷ Dari pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh negara yang

¹⁷ Ibid. 5

menyetujui rancangan resolusi ini, dapat disimpulkan ke dalam dua bagian.

Pertama, tugas dan fungsi DKPBB adalah untuk menegakkan Piagam PBB dengan menciptakan dan menjaga perdamaian. Kedua, tindakan Rusia akan membahayakan integritas wilayah lainnya apabila tidak segera dihentikan.

b. Negara yang Menolak dan Abstain

Rusia sebagai pihak yang menolak rancangan resolusi ini berpendapat bahwa, tekanan yang diberikan Amerika Serikat dalam sidang sebagai taktik yang licik. Tindakan ini memaksa Rusia untuk lagi-lagi menggunakan hak vetonya. Adapun persoalan rancangan resolusi ini, Rusia enggan melepas Luhansk dan Donetsk karena keputusan para masyarakatnya yang tidak ingin kembali menjadi bagian dari Ukraina, pernyataan ini disampaikan oleh Utusan Rusia untuk DKPBB, Nebenzia.

Selain itu, Amerika Serikat memiliki motif yang berbeda dari apa yang disampaikan oleh Utusan dan sekutunya. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nebenzia, ia menyatakan bahwa:

“It seems that our former partners from the West have once again demonstrated that, in reality, they do not want peace in Ukraine. They dream of Russia’s defeat, and, in the light of the rabid animosity of the West, they put other goals before us.”¹⁸

Amerika Serikat menggunakan standar ganda dengan ancamannya yang akan menggunakan militer demi membantu Taiwan namun mengecam tindakan Rusia dan sekutunya. Rusia juga mengklaim bahwa dalam rancangan resolusi ini Amerika Serikat dan Sekutunya telah bermain dengan kotor melalui tekanan politik dan memutarbalikkan fakta dan situasi bagi negara-negara kecil di PBB maupun DKPBB. Di sisi lain, Zhang Jun, Utusan Tiongkok untuk DKPBB telah menunjukkan intensi dari rancangan resolusi ini yang Ia sebut sebagai sebuah sarana bagi Amerika

¹⁸ Dokumen DKPBB S/PV.9143 (2022): 4

Serikat untuk melemahkan pengaruh Rusia, mengingat tujuan utama rancangan resolusi ini adalah untuk memukul mundur pasukan Rusia dari wilayah Ukraina dengan kekuatan militer. Tiongkok menakutkan eskalasi konflik yang berakhir menciptakan kehancuran. Hal serupa disampaikan oleh Utusan Brazil dan Gabon, yang takut implementasi poin ke-12 dari rancangan resolusi ini dapat menaikkan derajat peperangan ke derajat yang sangat tinggi. Pada akhirnya, peperangan akan semakin sulit untuk diatasi.

Dari kedua rancangan resolusi diatas terjadi perpindahan kubu pada tiga negara yakni, Uni Emirat Arab, Brazil dan Gabon. Dalam menyikapi perpindahan ini, peneliti menemukan bahwa terjadi proses balance of power dalam internal DKPBB.

BALANCE OF POWER DAN KEGAGALAN PBB DALAM MENEGAKKAN NORMA R2P DI UKRAINA

Situasi yang telah berlangsung antara Ukraina dan Rusia sudah berlangsung cukup lama. Sejak 2014, konflik ini belum menemukan titik terang. PBB melalui DKPBB telah berupaya menyelesaikan konflik ini melalui penegakkan norma R2P, dengan usaha merancang resolusi yang akan melegalkan intervensi kemanusiaan di Ukraina. Namun, dalam proses persidangan, peneliti menemukan adanya faktor yang mengganggu terwujudnya rancangan resolusi ini, yakni penyeimbangan kekuatan antara Rusia dan Amerika Serikat yang mewakili Ukraina. Hal ini terlihat jelas khususnya pada tahun 2022, saat DKPBB melakukan sidang atas rancangan resolusi S/2022/155 dan S/2022/720.

1. Rusia dan balance of power

Rusia menginvasi Ukraina dengan alasan menghapus nazisme di Ukraina serta sebagai bentuk keberatan terhadap keinginan Ukraina yang ingin bergabung ke NATO. Hal ini disampaikan oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin pada Februari 2022.

“Do you understand it or not, that if Ukraine joins NATO and attempts to bring Crimea back by military means, the European countries will be automatically pulled into a war conflict with Russia? of course NATO and Russia potentials are

*incomparable. We understand it. But we also understand that Russia is one of the leading nuclear states and by some modern components it even outperforms many. There will be no winners. And you will be pulled into this conflict against your will”.*¹⁹

Pernyataan Putin menyiratkan bahwa NATO seharusnya tidak ikut campur dalam konflik ini dan untuk tidak berusaha membawa Ukraina ke dalam keanggotaan NATO. Apabila NATO tidak mengindahkan pernyataan ini, Putin tidak segan untuk mengescalasi perang ke skala perang nuklir. Tindakan ini mengindikasikan posisi Rusia yang berada dalam tekanan terhadap pengaruh yang dimiliki oleh NATO terhadap situasi di Eropa Timur. Untuk mengatasi permasalahan ini, Rusia mulai bergerak menyeimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh Amerika Serikat dan NATO. Teori Balance of Power beranggapan bahwa dunia akan mencapai perdamaian dan terjaga stabilitasnya ketika sistem internasional yang berlaku adalah bipolaritas. Bipolaritas adalah sistem perimbangan kekuatan yang menempatkan negara-negara ke dalam dua kutub kekuatan yang saling bersaing dan dipimpin oleh satu kekuatan penentu.

Maka untuk menyeimbangkan kekuatannya Rusia perlu menarik negara-negara kecil ke dalam aliansinya. Hal ini terlihat dalam sikap Rusia, melalui BRICS yang memperluas wilayah kekuasaannya. BRICS merupakan aliansi antara Brazil, Rusia, Tiongkok, India dan Afrika Selatan. Dalam ekspansinya yang ditujukan ke negara-negara yang relatif maju di negara-negara berkembang. Namun terdapat perbedaan besar dalam kekuatan ekonomi dan militer di lima negara BRICS saat ini. Yang awalnya menyatukan mereka adalah gagasan bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama, terutama di bidang ekonomi. Fungsi Brics dapat disimpulkan sebagai:

¹⁹ Reuters. “Fact Check: Putin speech about Ukraine joining NATO predates invasion” Reuters Fact Check (1 Maret 2024) diakses pada 4 Juni 2024 <https://www.reuters.com/fact-check/putin-speech-about-ukraine-joiningnato-predates-invasion-2024-02-29/#:~:text=English%20subtitles%20show%20Putin%20saying,We%20understand%20it>

*“Common interests of emerging market economies and developing countries, but also building a harmonious world of lasting peace and common prosperity”.*²⁰

Pada saat yang sama, beberapa negara tersebut ingin meningkatkan pengaruhnya di negara berkembang. Kita dapat melihat bagaimana Rusia melibatkan Afrika dalam dekade terakhir. Sebagai contoh adalah Gabon, anggota DKPBB pada tahun 2022. Hubungan antara Rusia dan Gabon adalah hubungan bersahabat. Republik Gabon adalah salah satu mitra Rusia yang paling menjanjikan di Afrika Khatulistiwa. Kementerian luar negeri Gabon mengadakan konsultasi dan memelihara kerja sama di berbagai bidang, termasuk pertanian, pertambangan, pendidikan dan kebudayaan. Gabon memiliki pertumbuhan militer tercepat di dunia sejak november 2023 hingga Januari 2024, hal ini didasari oleh 58 tanker milik sovcomflot yang dikendalikan Rusia beralih ke Gabon yang sebelumnya berada di Liberia.²¹

2. Amerika Serikat dan Balance of Power

Sebagai negara yang berstatus superpower saat ini, Amerika Serikat juga memerlukan kekuatan yang mumpuni. Walaupun dalam teorinya yang bipolar, balance of power, yang secara hakikatnya akan menggerakkan negara yang berada diatas apabila terdapat indikasi negara yang berada di bawahnya mulai bergerak ke atas, sebagaimana yang dilakukan oleh Rusia dan sekutunya. Amerika Serikat, sejak masa perang dingin dikenal sebagai salah satu negara yang aktif dalam menyebarkan ideologinya sebagai negara yang liberal dan demokratis. Idealisme ini merupakan hal yang menarik bagi negara-negara yang

²⁰ Sholto Brynes “Brics may not be like the EU or Nato, but there is a reason so many countries want to join” thenationalnews.com (23 Agustus 2023) diakses pada 3 Juli 2024

<https://www.thenationalnews.com/opinion/comment/2023/08/23/brics-may-not-be-like-the-eu-or-nato-but-thereis-a-reason-many-countries-want-to-join/>

²¹ Michelle Wiese Bockman “Gabon emerges as Russia’s new best (maritime) friend to flag Russia-linked tankers” lloydlist.com (Januari 2024) diakses pada 3 Juli 2024 <https://www.lloydlist.com/LL1148107/Gabonemerges-as-Russias-new-best-maritime-friend-to-flag-Russialinked-tankers>

sebelumnya berada di bawah sistem oligarki atau imperialisme, seperti Jepang, Perancis, Jerman dan lainnya. Melalui idealisme ini Amerika Serikat mendapatkan citra sebagai negara yang melindungi negara-negara kecil lainnya.

Amerika Serikat yang hingga saat ini dikenal sebagai negara adidaya seringkali melakukan kontribusi terhadap negara-negara lainnya. Tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini sesuai dengan proses *balance of power* yang berusaha meningkatkan kekuatannya melalui citra sebagai negara yang ‘dermawan’ serta demokratis. Dalam konflik ini Amerika Serikat berperan sebagai sebuah negara yang demokratis sedangkan Rusia berperan sebagai negara yang otokrasi. Label terhadap kedua negara ini disematkan oleh Presiden Amerika Serikat, Joe Biden dalam pidatonya di Istana Warsawa, Polandia. Biden menyatakan:

“The great battle for freedom: a battle between democracy and autocracy, between liberty and repression, between a rules-based order and one governed by brute force”.²²

Pernyataan yang disampaikan oleh Biden telah menaruh ‘citra’ kedua negara sebagai taruhan. Tindakan Biden dapat diterjemahkan sebagai perlawanan terhadap pendapat yang menyatakan bahwa kejatuhan Ukraina akan membahayakan citra Amerika Serikat sebagai sebuah negara yang demokratis. Selain itu, peneliti melihat bagaimana Amerika Serikat melalui rancangan resolusi S/2022/155 menciptakan pernyataan yang ‘mengancam’ negara yang berseberangan dengannya dengan tuduhan pelanggaran terhadap Piagam PBB.²³ Rancangan resolusi ini sendiri diajukan oleh 81 negara, yang delapan puluh persennya merupakan negara kecil dan negara berkembang.

²² White House. “Remarks by President Biden on the United Efforts of the Free World to Support the People of Ukraine” [whitehouse.gov Speeches and Remarks](https://www.whitehouse.gov/Speeches/Remarks/2022/03/26/remarks-by-president-biden-on-the-united-efforts-of-the-free-world-to-support-the-people-of-ukraine/) (26 Maret 2022) diakses pada 3 Juni 2024 <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/03/26/remarks-by-president-biden-on-the-united-efforts-of-the-free-world-to-support-the-people-of-ukraine/>

²³ Dokumen DKPBB S/PV.8979 (Februari 2022): 3

Perubahan kubu yang terjadi pada internal DKPBB membuktikan adanya usaha penyeimbangan kekuatan dari kedua belah pihak, Amerika Serikat dan Rusia. Sebagaimana yang dinyatakan oleh para neorealis dimana kerjasama antar negara di dalam dunia Internasional masih mungkin saja terjadi. Selama hal itu dilakukan demi kepentingan negaranya dan juga sebisa mungkin negara dapat mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari kerjasama tersebut, melampaui apa yang tidak bisa dilakukannya sendiri tanpa mempedulikan timbal balik kepada negara lainnya. Hal inilah yang kemudian biasa disebut sebagai Zero-sum Game. Berdasarkan definisi ini, tidak mustahil bagi sebuah rancangan resolusi yang memiliki tujuan yang berbeda dari suatu kelompok negara menjadi cacat dan ditolak untuk diadopsi. Negara-negara anggota DKPBB mengesampingkan tujuan dan fungsinya dan kemudian saling berfokus untuk mempertahankan dan meningkatkan kekuatannya masing-masing.

KESIMPULAN

Penerapan norma responsibility to protect seharusnya dapat menjadi solusi terbaik untuk melindungi keselamatan masyarakat sipil. Namun, proses penerapannya masih sulit untuk dilakukan karena keterikatannya dengan Dewan Keamanan PBB, yang bertindak selaku pengaju rancangan resolusi. DKPBB yang terdiri dari 15 anggota dan termasuk didalamnya 5 anggota tetap pemegang hak veto, menjadi hambatan terbesar karena masing-masing anggota memiliki kepentingan sendiri dan kelompok. Dinamika power yang terdapat dalam internal DKPBB menjadi alasan utama kegagalan penerapan norma R2P di Ukraina. kegagalan penerapan norma R2P dapat dilihat dari dua indikator, collective action dan timely and decisive manner, yang keduanya tidak dapat dijalankan sebagaimana yang ditunjukkan dengan batalnya kedua rancangan resolusi, yakni rancangan resolusi S/2022/155 dan S/2022/720.

DAFTAR PUSTAKA

Bockman, Michelle W. "Gabon emerges as Russia's new best (maritime) friend to flag Russialinked tankers" lloydlist.com (Januari 2024) diakses pada 3 Juli 2024 <https://www.lloydlist.com/LL11->

48107/Gabon-emerges-as-Russias-new-best-maritimefriend-to-
flag-Russialinked-tankers

Borgia, Alicia. "The Russia–Ukraine crisis is bad news for China's economy" eastasiaforum (18 April 2022) diakses pada 25 Juni 2024 <https://eastasiaforum.org/2022/04/18/the-russiaukraine-crisis-is-bad-news-for-chinas-economy/>

Borgia, Flammata. "The Responsibility to Protect Doctrine: Between Criticisms and Inconsistencies" *Journal on the Use of Force and Internastional Law* Vol. 2 No 2 (2015): 225

Brynes, Sholto. "Brics may not be like the EU or Nato, but there is a reason so many countries want to join" thenationalnews.com (23 Agustus 2023) diakses pada 3 Juli 2024 <https://www.thenationalnews.com/opinion/comment/2023/08/23/brics-may-not-be-likethe-eu-or-nato-but-there-is-a-reason-many-countries-want-to-join/>

Dokumen DKPBB S/PV.8979 (Februari 2022): 3

Dokumen DKPBB S/PV.9143 (2022): 4

Dokumen PBB S/PV.8979 (2022): 13

Dokumen PBB S/PV.8979 (2022): 2

Global Centre for the Responsibility to Protect "What is R2P?" globalr2p (n.d) diakses pada 29 Juni 2024 <https://www.globalr2p.org/what-isr2p/#:~:text=The%20Responsibility%20to%20Protect%20populations%20from%20genocide%2C%20war%20crimes%2C%20crimes,Background%20Briefing%20on%20R2P>

Glover, Nicholas. "A critique of the theory and practice of R2P." *E-International Relations* (2011): 1. NBC. "Amb. Michael McFaul: U.S. has 'a major strategic interest to help the Ukrainians win the battle of Donbas'"

NBCUniversal (21 April 2022) diakses pada 4 Juni 2024
<https://www.yahoo.com/news/amb-michael-mcfaul-u-major-183111659.html> 181

Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect “Crime Against Humanity” United Nations (n.d) diakses pada 29 Juni 2024
<https://www.un.org/en/genocideprevention/crimes-against-humanity.shtml>

Reuters. “Fact Check: Putin speech about Ukraine joining NATO predates invasion” Reuters Fact Check (1 Maret 2024) diakses pada 4 Juni 2024 <https://www.reuters.com/factcheck/putin-speech-about-ukraine-joining-nato-predates-invasion-2024-02-29/>

Skrypchenko, Maksym. “Is China growing tired of Russia’s war in Ukraine?” aljazeera (17 April 2024) diakses pada 25 Juni 2024
<https://www.aljazeera.com/opinions/2024/4/17/is-chinagrowing-tired-of-russias-war-in-ukraine>

Statista. “Number of civilian casualties in Ukraine during Russia's invasion verified by OHCHR from February 24, 2022 to February 15, 2024” statista.com diakses pada 23 Juni 2024 <https://www.statista.com/statistics/1293492/ukraine-war-casualties/>

United Nations. “United Nations Charter, Chapter VIII: Regional Arrangements” un.org diakses pada 23 Juni 2024
<https://www.un.org/en/about-us/un-charter/chapter-8>

UNSC “9143rd Meeting: Maintenance of Peace and Security of Ukraine” S/PV.1943 (30 September 2022): 9

White House. “Remarks by President Biden on the United Efforts of the Free World to Support the People of Ukraine” whitehouse.gov Speeches and Remarks (26 Maret 2022) diakses pada 3 Juni 2024
<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speechesremarks/2022/03/26/remarks-by-president-biden-on-the-united-efforts-of-the-free-worldto-support-the-people-of-ukraine/>